

BAB III

TENTANG POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERKAIT ISU HAM DALAM PANGGUNG INTERNASIONAL

Tidak ada negara yang dapat bertahan hidup secara independen tanpa memiliki hubungan dengan negara lain. Pada akhirnya, setiap negara akan berinteraksi dan mengambil peran di arena global untuk mempertahankan eksistensinya dan mencapai tujuannya sendiri. Kerjasama dengan negara lain secara bilateral, berpartisipasi dalam forum internasional, dan bergabung dengan organisasi internasional. Penulis akan mencoba menjelaskan politik luar negeri AS ingin menjadi hegemon di dunia internasional dengan mempertimbangkan dampak AS terhadap masalah HAM di panggung internasional.

Penulis akan mencoba menjelaskan politik luar negeri AS, khususnya terkait dengan HAM di dunia internasional dan faktor-faktor yang mendukung peran tersebut. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan hubungan AS dengan lembaga internasional, terutama perilakunya dan pengaruh yang dimilikinya terhadap lembaga internasional.

3.1 Sejarah AS Dalam Dunia Internasional Terkait Isu HAM

Perang dunia II dikenal sebagai salah satu peristiwa terkelam yang pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Karena berlangsung bertahun-tahun lamanya, dan telah merenggut jutaan nyawa manusia. Perang Dunia II menunjukkan betapa tidak efektifnya sistem internasional saat itu. AS dan

sekutunya memenangkan Perang Dunia II setelah enam tahun berperang. Setelah tragedi tersebut, AS memutuskan bahwa mereka membutuhkan sistem baru yang dapat mengatur dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan negara-negara dunia yang lebih adil dan terbuka. Sistem ini dikenal sebagai Tatanan Internasional Liberal.⁷⁰ Tatanan internasional liberal merupakan sebuah sistem dengan tujuan untuk mencegah terjadi perang-perang selanjutnya. Secara umum tatanan internasional liberal adalah sebuah keinginan untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan dan kemakmuran bersama serta sebuah tatanan yang berdasar pada hukum-hukum internasional. Lahirnya sebuah tatanan internasional juga memunculkan lembaga-lembaga internasional baru pada masa itu seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang kemudian semakin berkembang dan terstruktur yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷¹

Perang dunia II menjadikan AS sebagai pemenangnya membuatnya muncul sebagai negara yang hegemon dan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. AS sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM memiliki peranan yang sangat penting dan berpengaruh di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan AS selalu hampir terlibat dalam seluruh masalah dan isu besar yang terjadi di dunia ini. Keterlibatan tersebut terdiri dari keikutsertaan AS dalam forum-forum regional maupun internasional. Pasca perang dunia II para pengamat politik mendeskripsikan AS dengan berbagai nama diantaranya adalah *superpower*,

⁷⁰Hans Kundnani, *What is the Liberal International Order*, diakses dalam <https://www-gmfus-org.translate.goog/news/what-liberal-international-order? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> (12/19/2023,11:00 WIB)

⁷¹Rahmad Ardiansyah, *Perbedaan LBB dan PBB*, diakses dalam <https://idsejarah.net/2019/04/perbedaan-lbb-dan-pbb.html> (12/19/2023,11:00 WIB)

global leader dan *leader of the world*. Tentunya instrumen dan ideologi yang muncul setelah perang dunia II berakhir tidak terlepas dari pemikiran AS dan nilai-nilai yang dibawa olehnya. Kepentingan nasional Amerika dapat dicapai melalui sistem internasional liberal. Dimulai pada masa ini, Amerika dianggap sebagai pemimpin dunia bebas. Institusi internasional memperoleh karakteristik baru karena Amerika Serikat yang terkenal dengan demokrasinya.⁷²

Setelah berakhirnya perang dunia II, dua negara yang menjadi *super power* utama saat itu adalah AS dan Uni Soviet. Namun setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, AS menjadi satu-satunya negara *super power* dominan. Tidak dapat dipungkiri bahwa AS merupakan negara adidaya atau dapat disebut sebagai negara adidaya saat ini. Saat itu AS semakin memperluas pengaruhnya dalam berbagai bidang salah satunya yaitu militer dimana AS memainkan peran utama sebagai polisi dunia dalam konflik internasional dan berusaha mempertahankan stabilitas global sejak tahun 1990-an. Selain itu juga berinovasi dalam bidang lain seperti teknologi, seperti internet, komputer, senjata nuklir, pesawat, dan perjalanan luar angkasa dan masih banyak lagi keberhasilan-keberhasilan nyata AS yang bisa kita lihat dan rasakan hingga saat ini.⁷³

Menurut konstitusi AS mengenai HAM bahwa secara alamiah seseorang individu wajib diakui secara penuh serta dihormati oleh pemerintah. hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang bersifat internasional sehingga membuatnya dikenal sebagai *global leader* yaitu sebuah kebijakan global yang

⁷² Congressional Research Service, *U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress*. diakses dalam <https://crsreports.congress.gov>, (12/19/2023, 11:27 WIB)

⁷³ Saddam Hussein, *Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global*, *Journal of Global & Policy*, Vol.1, No. hal. 85.

bertujuan untuk kebaikan banyak pihak, dimana hal tersebut juga sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri AS yaitu membangun peradaban liberal internasional, ini dilakukan AS dengan mengejar kekuasaan sebesar-besarnya dan oleh karenanya disebut juga sebagai kebijakan yang mengajak hegemoni dunia.⁷⁴ Elemen kunci peran AS di dunia internasional sejak perang dunia II yaitu mempertahankan dan memajukan tatanan internasional yang liberal serta Pertahanan dan promosi HAM, demokrasi, dan kebebasan.

3.2 Tentang Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Isu HAM

Sejak perang dunia kedua, fokus kebijakan luar negeri AS adalah internasionalisasi, yang berarti bahwa AS harus terlibat secara aktif dalam hubungan internasional. Bagi AS, tantangan politik saat itu adalah melepaskan dominasi Uni Soviet di Asia dan Eropa, sehingga AS harus berpartisipasi secara aktif dalam hubungan internasional, terutama dalam hal penegakkan hak asasi manusia. Mempertahankan dan memperluas kekuatan untuk memenuhi kepentingan perdagangan dan keamanan adalah tujuan utama kebijakan luar negeri AS.⁷⁵

Reputasi AS dinilai menurun drastis selama pemerintahan Trump. AS sering mengambil kebijakan yang kontroversial, seperti meninggalkan perjanjian iklim Paris dan perjanjian nuklir dengan Iran, dan memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Amerika Serikat kehilangan kredibilitasnya sebagai aktor politik

⁷⁴ Nur Rachmat, *Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol, 5 No, 2, hal. 197.

⁷⁵ Michael H. Hunt, (2009), *Ideology and US foreign policy*, Yale University Press, hal. 125.

global karena kebijakan unilateralismenya. Presiden Trump keluar dari banyak badan dunia dan aliansi karena kebijakan ini.⁷⁶

Kemudian pada bulan Januari 2020, *Pew Research Center* merilis survei terhadap 32 negara yang menunjukkan bahwa hanya 29% yang menyatakan percaya pada Trump dan sebanyak 64% mengatakan tidak percaya pada Trump untuk melakukan yang benar dalam urusan dunia. Sehingga pada presiden AS setelahnya yaitu Joe Biden memperbaiki hal tersebut, melalui kebijakan luar negeri terhadap HAM di Xinjiang dapat mengembalikan citra AS di mata dunia. Terlebih lagi, AS berkomitmen untuk menjadikan HAM sebagai tujuan dari kebijakan luar negerinya. Selain itu juga, berdasarkan penyampaian dari Presiden AS yang ke-39 yaitu Jimmy Carter, inti dari pidatonya menjelaskan sebagai polisi dunia dan negara yang selalu mempromosikan HAM, bagi AS HAM merupakan jiwa dari kebijakan luar negeri AS.⁷⁷

Dalam kasus ini Presiden AS Joe Biden menunjukkan bahwa isu HAM khususnya kebebasan beragama adalah prioritas dalam pemerintahannya baik dalam domestik maupun internasional. Setelah resmi diangkat sebagai Presiden, Joe Biden bergerak cepat dan aktif dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri AS khususnya yang berkaitan dengan isu HAM domestik maupun internasional.⁷⁸ Pada hari pertamanya sebagai presiden, Joe Biden mencabut

⁷⁶ Lisbet, Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Joe Biden, Vol, XIII, No, 3

⁷⁷ US Department of State, *Report Commission on Unalienable Rights (Indonesian)*” diakses dalam https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/11/REPORT_COMMISSION_UNALIENABLE_RIGHTS_INDONESIAN-508.pdf (12/19/2023, 13:27 WIB)

⁷⁸ Kenneth Roth, *Bidden's Challenge: Redeeming a US Role for Human Rights*, diakses dalam <https://www.hrw.org/world-report/2021/bidens-challenge> (01/13/2024, 04:27 WIB)

larangan muslim yang ditetapkan pada masa pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Yaitu kebijakan pelarangan muslim masuk di AS. Sehingga pada awal pemerintahannya Joe Biden telah menentukan arah baru mengenai kebebasan beragama di AS. Terdapat tujuh cara Pemerintahan Joe Biden dalam menunjukkan kebebasan beragama di dalam dan luar negeri:

1. Menghentikan diskriminasi berdasarkan agama dalam sistem imigrasi AS
2. Memperluas perlindungan hak-hak sipil berdasarkan agama
3. Menyetel ulang peraturan federal untuk menghormati kebebasan beragama
4. Penataan urusan agama dapat berjalan dengan baik jika pemimpinnya berasal dari latar belakang beragam agama.
5. Melindungi tanah suci bagi masyarakat adat
6. Memerangi kekerasan supremasi kulit putih dan memberlakukan undang-undang kejahatan rasial
7. Memajukan kebebasan beragama internasional sebagai bagian dari kerangka HAM yang saling bergantung.⁷⁹

Pada point ke tujuh dalam kebijakan luar negeri AS, Salah satu tindakan yang penting yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden adalah menyatakan kekejaman di Xinjiang sebagai kejahatan genosida. Pada tahun 2021 Joe Biden menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa terhadap masyarakat Xinjiang khususnya Muslim Uighur. Sebagai respon terhadap kekejaman tersebut, Pemerintah AS menggunakan berbagai alat diplomatik dan

⁷⁹ Maggie Siddiqi, *7 Ways the Biden Administration Advanced Religious Liberty During Its First Year*, diakses dalam <https://www.americanprogress.org/article/7-ways-the-biden-administration-advanced-religious-liberty-during-its-first-year/> (12/30/2023. 17:38 WIB)

sanksi ekonomi dalam mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama serta kesetaraan HAM di Xinjiang China pada panggung global.

Sejak dulu, tidak dapat dipungkiri bahwa AS selalu terlibat dalam seluruh masalah dan isu besar yang terjadi di dunia tak terkecuali isu pelanggaran HAM di Xinjiang China. Peran kebijakan luar negeri AS yaitu mempertahankan serta membela HAM di tingkat global serta menegakan pelanggaran di Xinjiang. Karena dianggap sebagai negara yang melahirkan konsep HAM, serta pengaruhnya yang sangat besar dan kuat, AS menempatkan dirinya sebagai advokat utama HAM di dunia.⁸⁰ Melalui pernyataan publik dan diplomatik digunakan sebagai alat untuk menegakan pelanggaran HAM yang terjadi serta menuntut pertanggungjawaban.

Berikut ini beberapa langkah-langkah yang dilakukan AS dalam mencapai kebijakan luar negerinya yaitu:

1. Diplomasi

Yaitu suatu tindakan bekerja dan bernegosiasi dengan perwakilan dari negara asing dalam mencapai konsensus dan menetapkan landasan bagi peraturan di masa depan. Cara ini dapat berbentuk kesepakatan, perjanjian, aliansi dan konvensi. Hubungan yang dilakukan para diplomat dengan perwakilan negara lain untuk memahami perspektif mereka, sekaligus menggambarkan serta mempromosikan nilai-nilai dan posisi AS.

2. Bantuan Luar Negeri

Salah satu cara paling ampuh untuk mencapai tujuan luar negeri suatu negara adalah dengan memberikan bantuan luar negeri, membangun hubungan

⁸⁰ Darmawan, J. E. 2016, *Sikap Amerika Serikat terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Iran Periode 2011-2014*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. hal. 20.

dengan negara lain dan mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian kemanusiaan. Ada berbagai bentuk bantuan termasuk bantuan militer asing, bantuan kemanusiaan, bantuan pangan dan bantuan pembangunan umum. AS saat ini menghabiskan kurang dari satu persen anggaran untuk bantuan luar negeri.⁸¹

3. Sanksi

Negara dapat memberikan sanksi dalam upaya mengubah perilaku negara lain. Sanksi dapat digunakan untuk menyatakan ketidaksukaan terhadap perilaku yang ada, dan membatasi peluang untuk melanjutkan perilaku tersebut, serta menghalangi negara lain untuk melakukan tindakan yang sama. Berbagai jenis sanksi diantaranya embargo senjata, embargo perdagangan, pembekuan aset, dan pembatasan perjalanan. Secara historis, sanksi yang paling sering diterapkan sebagai upaya untuk mengambil sikap terhadap pelanggaran HAM di AS.⁸²

Presiden Amerika Serikat memiliki otoritas tertinggi dalam proses membuat kebijakan luar negeri. Presiden memiliki otoritas untuk memilih panglima militer, memilih duta besar, dan memilih perwakilan untuk menghadiri pertemuan dengan negara lain. Disisi lain, presiden wajib meyakinkan Kongress untuk proposal kebijakannya. Fungsi kongres di AS sangatlah penting dalam mengesahkan usulan kebijakan, bertugas memberi ratifikasi traktat maupun perjanjian, dan membuat rancangan keuangan.⁸³

⁸¹The Epoch Times, *US Must Champion Human Rights in Foreign Policy, State Department Panel Concludes*, diakses dalam <https://www.theepochtimes.com/article/us-must-champion-human-rights-in-foreign-policy-state-department-commission-concludes> (12/26/2023. 20:14 WIB)

⁸²Arin Kerstein, *Tools For Achieving Foreign Policy Goals*, diakses dalam <https://borgenproject.org/tools-achieving-foreign-policy-goals/> (12/26/2023. 9:13 WIB)

⁸³Jonathan Masters, *US Foreign Policy Powers: Congress and the President, Council on Foreign Relations*, diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/us-foreign-policy-powers-congress-and-president> (12/26/2023. 21:45 WIB)

Orientasi kebijakan luar negeri AS, merujuk pada arah maupun pendekatan yang diambil AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan upaya untuk membuat sebuah perubahan di dunia khususnya terkait isu HAM di berbagai negara. Aksi-aksi yang dilakukan oleh AS memungkinkan penerapan kebijakan luar negeri AS yang berbasis HAM dan demokrasi. Namun, untuk menjalankan kebijakan tersebut, presiden harus memainkan peran pemimpin selama masa jabatannya. Dari masa ke masa, presiden AS tersebut telah membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah HAM dalam kebijakannya di luar negeri.

3.2.1 Struktur Aktor Pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS

AS merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan politik demokrasi presidensial, yaitu jabatan Presiden di AS dianggap sebagai Panglima Tertinggi sehingga memiliki kuasa hak penuh mengatur Angkatan Bersenjata AS dan badan eksekutif pemerintahan federal AS. Kemudian dalam mengatur dan memutuskan suatu kebijakan luar negeri, Presiden di AS bersama yang dikenal dengan dewan keamanan nasional, yaitu sebuah forum yang dimana presiden memutuskan dan membahas suatu kebijakan luar negeri dengan pejabat pemerintahan yang terbagi menjadi dua: *cabinet members* yaitu pejabat kementerian dan *office members* yaitu pejabat kantor eksekutif. Pejabat kementerian yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan adalah Menteri Luar negeri dan Menteri Pertahanan, sedangkan dari pejabat kantor eksekutif yaitu Penasihat Keamanan Nasional atau staf lain yang dianggap perlu

oleh presiden.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ada perbedaan di antara pejabat kementerian dan pejabat kantor eksekutif. Dengan izin presiden sebagai kepala pemerintahan, pejabat kementerian, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, memiliki otoritas untuk mengatur birokrasi yang mereka representasi. Namun, karena keduanya merupakan dua birokrasi penting dalam kebijakan luar negeri AS, ada kecurigaan bahwa tindakan dan pernyataan pejabat kementerian lebih mengutamakan kepentingan sektoral daripada kepentingan nasional. terutama peraturan persetujuan senat yang mengancam posisi ini karena kepentingan yang bertentangan.⁸⁴ Penasihat Keamanan Nasional dan pejabat kantor eksekutif lainnya dianggap sebagai pendapat independen utama presiden tentang kebijakan luar negeri, karena mereka tidak memerlukan konfirmasi senat. Namun, karena mereka bukan anggota kabinet, mereka tidak memiliki lembaga atau kementerian yang terlibat dalam kebijakan internasional, seperti militer atau diplomat.

Terdapat lebih dari 190 negara di dunia, dan AS memelihara hubungan diplomatik dengan 180 senagar sekitar, serta dengan banyak organisasi internasional. Dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang perjalanan, perdagangan, dan teknologi telah menjadikan dunia saat ini lebih saling terhubung dibandingkan dengan sebelumnya sehingga menjadikan interaksi dengan negara-negara lain dan warga negaranya menjadi lebih penting bagi AS. Proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri AS terdiri dari beberapa agensi yaitu:

⁸⁴ Dueck, *The Role of the National Security Advisor and the 2006 Iraq Strategy Review*, Vol. 58 No. 1

Presiden dan Departemen Luar Negeri⁸⁵

A. Presiden Joe Biden sebagai Panglima Tertinggi (*Commander-in-Chief*)

Selama 48 tahun terakhir karir politiknya, Joe Biden telah menduduki dua posisi penting. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden selama dua periode (2009-2017) dalam pemerintahan Presiden Barack Obama, Joe Biden adalah anggota senior senat komisi kehakiman selama empat puluh tahun (1973-2009). Dengan demikian, rekam jejak yang meyakinkan Joe Biden menunjukkan kemampuan dan kejujuran, bahkan dianggap sebagai komoditas terbaik dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS.

Joe Biden memiliki tujuh tujuan utama untuk menerapkannya. Tiga di antaranya berfokus pada multilateralisme. Pertama, menghidupkan kembali aliansi dengan Eropa melalui kerjasama transatlantik. Ini karena selama pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya, hubungan transatlantik memanas karena AS keluar dari aliansi. Joe Biden akan menghidupkan kembali dua jenis aliansi: kerjasama dengan NATO untuk memerangi ancaman sekuritas modern seperti terorisme, ancaman cyber, dan misil. Ketiga Memajukan kebebasan beragama internasional sebagai bagian dari kerangka HAM yang saling bergantung. Khususnya yang masih terjadi saat ini yaitu pelanggaran HAM di Xinjiang China. Joe Biden memanfaatkan itu tersebut untuk memperbaiki citra AS di mata dunia serta menggantikan posisi China sebagai negara dominan di abad-21.⁸⁶ Dapat dilihat bahwa melalui agenda kebijakan luar negeri yang disuarakan Joe Biden dalam kampanyenya, terdapat kecenderungan untuk perbaikan

⁸⁵ Department of State, *About the US Department of State*, diakses dalam <https://www.state.gov/about/> (12/29/2023. 21:29 WIB)

⁸⁶

kebijakan luar negeri AS.

B. Antony Blinken Sebagai Menteri Luar Negeri

Blinken menjadi penasihat kebijakan luar negeri dalam struktur kampanyenya pada pemerintahan Joe Biden,. Ia mengatakan AS akan terus bersuara menentang pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. pemerintahan Joe Biden akan melakukan pendekatan yang lebih tegas dalam meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah tersebut. Ia percaya AS meskipun sebagai negara *super power* dan menjadi yang terkuat, tidak akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan global dengan sendirian. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kasus pelanggaran HAM di Xinjiang, China, ia menyarankan agar AS dapat bekerjasama dengan membentuk aliansi bersama dengan negara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Blinken memiliki kemiripan terkait prinsip liberal institusionalisme dengan Joe Biden.Salah satunya yaitu mendukung kesetaraan HAM internasional tidak terkecuali yang dialami oleh etnis Uighur di Xinjiang,China. .

3.3 Mempertahankan dan Mempromosikan HAM dalam Panggung Global

AS dikenal sebagai negara pertama yang membentuk dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat berpartisipasi dan memerintah melalui wakil yang dipilih. Demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai ide atau cara hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Amerika Serikat membentuk dunia yang lebih baik, aman, stabil, dan sejahtera dengan

melindungi hak-hak asasi seperti hak pekerja dan kebebasan beragama.⁸⁷ Teori demokrasi berasal dari Yunani kuno dan diterapkan di negara-negara antara abad ke-4 SM dan ke-6 SM. Ini memiliki prinsip-prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.⁸⁸

AS setidaknya merupakan negara paling pertama yang menganut nilai-nilai demokrasi dan terus meletakkan demokrasi sebagai salah satu kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, AS juga mempromosikan kebebasan dan HAM. Kebebasan dan HAM sangat terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dari demokrasi itu sendiri; oleh karena itu, sangat penting untuk menyebarkan dan melindungi kebebasan dan HAM, karena tidak ada demokrasi yang dapat berfungsi dengan baik tanpa perlindungan dan kebebasan HAM.⁸⁹ AS telah memainkan peran penting dalam mengembangkan instrumen HAM internasional. Selain itu juga, AS berperan penting dalam penyusunan perjanjian HAM dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Selama perang dingin, perhatian AS terhadap HAM bersifat selektif. AS mengancam keras pelanggaran HAM di pemerintahan komunis yang berkuasa di

⁸⁷ Jila Ahmadi, *Human Rights in US Foreign Policy*, International Journal of Political Science, Vol, 9, No, 4, (Winter 2019)

⁸⁸ Anugrah Dwi, *Demokrasi: Pengertian dan Sejarahnya di Indonesia*, diakses dalam <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/26/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahnya/> (12/20/2023, 11:54 WIB)

⁸⁹ US Department of State, *2016-17 Advancing Freedom and Democracy Report*, diakses dalam <https://www.state.gov/2016-17-advancing-freedom-and-democracy-report/>, (12/20/2023, 5:27 WIB)

Eropa Timur, Korea Utara, Kuba, dan Tibet. Lebih dari dua abad lamanya, AS berperan aktif dalam melindungi HAM di dalam maupun luar negeri. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berfokus pada penghormatan terhadap HAM, yang digariskan dalam Deklarasi Universal HAM. Mendukung demokrasi tidak hanya mendukung nilai-nilai dasar AS seperti kebebasan beragama, tetapi juga membantu membangun dunia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. Dalam mendukung demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai fundamental AS seperti kebebasan beragama namun juga menciptakan arena global yang lebih stabil dan aman. AS menggunakan berbagai cara untuk memajukan agenda kebebasan, termasuk juga diplomasi bilateral, keterlibatan multilateral, bantuan luar negeri, pelaporan dan penjangkauan publik dan sanksi ekonomi terhadap suatu negara yang dengan sengaja melakukan pelanggaran HAM, Seperti yang dilakukan oleh China terhadap lebih dari 2 juta warganya yang berada di Xinjiang khususnya terhadap etnis Uighur karena beberapa faktor seperti yang sudah saya sebutkan pada sub bab II.

3.2.1 Perilaku AS Terhadap Organisasi Internasional

AS disebut dikenal sebagai pemimpin global, *hegemony* dan banyak nama lainnya seperti yang sudah disebutkan diatas, sehingga salah satu yang menjadikan AS sebagai negara di dunia yang memiliki kemampuan serta kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin dunia dan memiliki pandangan yang sangat berpengaruh dalam organisasi/institusi internasional terhadap suatu hal maupun isu internasional. Sehingga, AS sangat aktif dalam hubungan internasional dengan semua instrumennya. Khususnya masalah yang berkaitan

dengan tujuannya di luar negeri. Organisasi internasional didirikan atas dasar liberal dan digunakan untuk melindungi kepentingan negara-negara dunia modern. Organisasi internasional juga merupakan forum bagi negara-negara dunia dalam mencapai kepentingan nasional mereka sendiri tanpa harus bertindak secara unilateral dan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain, selain itu juga digunakan sebagai wadah bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam negeri maupun internasional.

3.3.2 Dampak AS Terhadap Organisasi Internasional

Sebagai negara yang mengambil alih, Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi semua organisasi internasional. Selain masalah keamanan dan ekonomi, kemampuan AS untuk mempengaruhi organisasi internasional juga diperhatikan. Jika AS tidak membantu, hampir seluruh organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional juga memiliki kemampuan yang cukup untuk merespon ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Amerika Serikat menolak ratifikasi kesepakatan lingkungan, yang menyebabkan tidak ada kesepakatan yang berhasil. Amerika Serikat tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi organisasi oleh negara lain. Pada akhirnya, perdebatan tentang hegemoni Amerika Serikat akan kembali ke kekuatan yang dapat mereka miliki terhadap organisasi internasional. Kemampuan Amerika Serikat sebagai hegemon memiliki dua dimensi kekuatan, yaitu kemampuan untuk mengatur agenda dan mengaktifkan ayau tidak mengaktifkan.

